

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP
ANGKA MELEK HURUF, DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2010 DAN 2011**

Mujiyati dan Heppy Purbasari

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan, Kartasura, Sukoharjo

Bina Sarana Informatika

Jl. Letjen Sutoyo 43, Cengklik, Surakarta

email : Mujiati@ums.ac.id

heppy.hpr@bsi.ac.id

Abstract

The purpose of Indonesian fiscal decentralization that started on 2001 is focus on the local government development. Fiscal decentralization is believed to create public services efficiency on local government. Furthermore, fiscal decentralization ensure the local budget (APBD) is spent to develop health and education sectors as these sectors are part of basic needs. This study aims to examine how fiscal decentralization influence to the local educational development in term of literacy rate (AMH) and school enrolment rate (APS). This study uses data based on the kabupaten/kota over Central Java Province in the periods of 2010 – 2011. This study also uses linear regression with non-probability sampling as there is 35 kabupaten/kota each year uses for population and sample in this study. Result shows that fiscal decentralization has an influence to AMH and APS based on the data from kabupaten/kota in Central Java in the periods of 2010 -2011. Thus, it could be conclude that local governments (kabupaten/kota) in Central Java Province have used local revenue to provide public education services specifically in improving literacy and school enrolment rate for 7-15th year students.

Keywords : fiscal decentralization, literacy rate, school enrolment rate.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang senantiasa memperbaiki struktur pemerintahan dan kualitas pembangunan nasional, guna mewujudkan cita-cita bangsa yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai cita-cita tersebut pemerintah mengupayakan dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan perekonomian bangsa. Kesuksesan sistem perekonomian dapat dilihat dari besarnya pendapatan negara, terutama pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan daerah yang diterima pemerintah semakin banyak dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, perekonomian adalah komponen utama demi berlangsungnya sistem pemerintahan.

Pada awal tahun 2001 Indonesia melakukan perombakan besar-besaran terhadap sistem pengelolaan pemerintahan. Proses pelaksanaannya dimulai dengan penyempurnaan

tatanan politik pemerintahan terhadap UU No. 22 tahun 1999 diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang diganti dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang sumber pendapatan daerah. Penyempurnaan ini kemudian diikuti dengan adanya otonomi daerah sebagai berlakunya desentralisasi fiskal.

Otonomi daerah merupakan amanat konstitusi dan kebutuhan objektif dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat menunjang tujuan nasional Indonesia. Dalam pembentukan otonomi daerah harus memperhatikan faktor-faktor kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional serta syarat-syarat lain yang mendukung. Selain itu diberlakukan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata dapat diartikan bahwa kewenangan, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan potensi dan kekhasan daerah sedangkan pengertian otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Darise, 2006). Keputusan pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan melancarkan pembangunan daerah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan.

Demi terwujudnya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah pusat melakukan gebrakan dibidang keuangan, yaitu dengan merubah kebijakan sentralisasi menjadi kebijakan desentralisasi. Kebijakan sentralisasi mengandung arti bahwa segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan merupakan wewenang pusat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para birokrat pusat. Hal ini mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan menciptakan ketimpangan pembangunan diberbagai wilayah Indonesia. Terlebih lagi Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perbedaan karakteristik wilayahnya. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah pusat menciptakan kebijakan baru dimana pemerintah daerah diberi kesempatan yang relatif luas bagi tumbuhnya partisipasi masyarakat serta mendorong daerah untuk melakukan keputusan secara mandiri, tanpa harus bergantung dari kebijakan pusat (Soebagiyo 2013). Selain itu, pemerintah daerah juga diberi tanggung jawab untuk mengatur perekonomian daerah dibidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan dan aspek pengeluaran. Kebijakan ini dikenal dengan kebijakan desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal diarahkan untuk menunjang terwujudnya pelayanan publik terhadap masyarakat daerah sampai pada tingkatan paling kecil yaitu desa. Desentralisasi

fiskal dilakukan karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi daerahnya sampai tingkat paling kecil. Sehingga daerah bisa segera menangani dengan cepat apabila terjadi permasalahan. Pelayanan public yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat bisa berupa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan sebagainya. Pelaksanaan desentralisasi fiskal menyebabkan daerah harus mampu membiaya daerahnya melalui pendapatan daerah. Struktur geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau menyebabkan pendapatan tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan pendapatan tiap daerah menyebabkan ketimpangan, sehingga pemerintah pusat mengalokasikan dana APBN untuk dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam membantu daerah untuk melaksanakan desentralisasi.

Dalam penelitian Jean Paul dan Fabio Sanchez (2006) dalam Noval Akhmad Huda dan Hadi Sasana (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara jumlah belanja bidang pendidikan dengan outcome bidang pendidikan yang berarti semakin tinggi jumlah belanja pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka semakin tinggi juga partisipasi sekolah pada daerah tersebut.

Kebijakan otonomi daerah yang menimbulkan semangat desentralisasi fiskal mengharuskan daerah untuk menggali kekayaan daerah, mengatur kebijakan daerah dan menyusun peraturan untuk pengembangan daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan daerah lebih mandiri dalam mengurus daerahnya sendiri, baik dari sisi pembangunan daerah, hasil pertanian/hutan, kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya desentralisasi fiskal peneliti tertarik untuk meneliti: seberapa besar pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf dan angka partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya desentralisasi fiskal dalam pengembangan bidang pendidikan terutama dalam Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah dan dapat dijadikan referensi tentang implimentasi Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa otonomi daerah merupakan keleluasaan dan kreatifitas daerah dalam mengembangkan potensi daerah dan tidak lagi sekedar menjalankan perintah dari pusat. Otonomi daerah tidak hanya pada pembagian dana pembangunan yang adil oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan selain itu

otonomi daerah dianggap berhasil jika sumbangan yang diberikan masyarakat dalam pembangunan daerah yang disebut Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi daerah (Saragih 2003).

Otonomi yang nyata dapat diartikan bahwa kewenangan, tugas, dan kewajiban pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan potensi dan kekhasan daerah sedangkan pengertian otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan otonomi daerah itu sendiri termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Darise 2006).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bagian dari desentralisasi. Desentralisasi fiskal didefinisikan sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah atau pajak daerah. Dalam melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka Pemerintah Daerah harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat (Sianturi, 2011).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah sebagai penyedia barang public, yang berarti pemerintah daerah harus memiliki pemahaman yang lebih baik daripada pemerintah pusat (Oates, 1993). Beberapa kebijakan Desentralisasi fiskal daerah harus mampu menyediakan anggaran belanja untuk sector pendidikan dan sector kesehatan. Pemerintah daerah harus mampu Pengalokasian sector pendidikan untuk mampu merencanakan dan menganggarkan agar mampu bersaing dengan sector swasta yang bergerak pada bidang pendidikan (Huda dan Hadi, 2013).

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan penyediaan pelayanan barang public dengan lebih efisien. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2011, Angka Melek Huruf (AMH) di provinsi jawa tengah selama tahun 2005-2011 mengalami peningkatan. AMH pada tahun 2011 meningkat menjadi 90,34% dibandingkan tahun 2010 yaitu sebesar 89,95% tetapi peningkatan di tahun 2011 tetap berada dibawah rata-rata nasional yaitu 92,99%. Jika dilihat AMH per kabupaten/kota, Kabupaten/kota yang memiliki nilai AMH tertinggi terdapat pada Kabupaten Magelang 97,29% dan AMH terendah terdapat pada Kabupaten Wonogiri 83,50%. Sedangkan data mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Putus Sekolah mengalami perbaikan selama 5 tahun terakhir.

Dalam penelitian Solechah (2003) di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan angka partisipasi sekolah, pendapatan perkapita masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi sekolah, sedangkan rasio murid dan guru berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap angka partisipasi sekolah di 10 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Huda dan Sasana (2013), di Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap angka kelulusan sekolah dan tingkat putus sekolah siswa. Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka partisipasi sekolah tidak ditemukan hasil yang signifikan. Output pendidikan berupa tingkat kelulusan sekolah SMA/SMK belum memberikan hasil pengaruh yang signifikan terhadap outcomes pendidikan.

Desentralisasi fiskal bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan barang publik, memberi pelayanan publik secara efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat dari pemerintah pusat ke daerah, selain itu, desentralisasi fiskal juga bertujuan agar masyarakat daerah lebih berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan dasar, yaitu pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Bakti dan Kodatie (2012), di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pendapatan dan sisi pengeluaran dengan analisis fixed effect model metode tidak berpengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan maupun terhadap angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan teori yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan angka melek huruf di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2011.

H_2 = Terdapat hubungan positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal dengan angka partisipasi sekolah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2011.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2010 dan 2011. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berjumlah 35, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 70 Kabupaten/Kota.

Angka Melek Huruf diimplimentasikan dari persentase penduduk berusia 7-15 tahun yang mampu membaca dan menulis huruf kapital maupun huruf latin lainnya. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah diukur dengan sejumlah penduduk yang masih sekolah SD/MI dan SMP/MTS dengan usia tertentu terhadap penduduk usia sekolah yang ada di Kabupaten/kota tertentu. Pengukuran Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan PAD terhadap total penerimaan daerah.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan asumsi klasik dan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$AMH = a_1 + b_1 DDF + e$$

$$APS = a_1 + b_1 DDF + e$$

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPS Jawa Tengah tahun 2010-2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berjumlah 35 yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kotamadya.

Berdasarkan data yang telah terkumpul sebanyak 70 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diperoleh statistic deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1
Pengujian Deskriptif

Keterangan	Min	Max	Mean
AMH	83,43	97,18	91,6686
APS	164,78	198,83	186,5083
DDF	0.05	0,25	0,0978

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan table tersebut Kabupaten/Kota yang memiliki Angka Melek Huruf terendah terdapat pada Kabupaten Wonogiri tahun 2011 dan yang memiliki Angka Melek Huruf tertinggi terdapat pada Kabupaten Magelang Tahun 2010 dan rata-rata Angka Melek Huruf di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,67 yang berarti seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah telah terbebas dari buta huruf pada usia 7-15 tahun. Angka Partisipasi Sekolah terendah terdapat pada Kabupaten Wonosobo pada tahun 2010, Angka partisipasi Sekolah tertinggi terdapat pada Kabupaten Semarang tahun 2010 dan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Jawa Tengah sebesar 186,51 yang berarti seluruh anak usia sekolah 7-15 tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah telah mengikuti pendidikan dasar 9 tahun.

Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah yang terendah terdapat pada Kabupaten Klaten dan Demak tahun 2010 sedangkan Desentralisasi Fiskal tertinggi terdapat pada Kabupaten Semarang tahun 2011 dan rata-rata Desentralisasi Fiskal di Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,0978 yang berarti Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi kepada Pendapatan Daerah sebesar 9,7%.

Dari hasil pengujian asumsi klasik diperoleh sebagai berikut:

1. Normalitas

Pengujian normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *statistic non parametric Kolmogorov-Smirnov* (KS). Dari hasil pengujian tersebut diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas
Kolmogorov-Smirnov

Keterangan	Persamaan Regresi I	Persamaan Regresi II
Nilai KS	0,779	1,035
Sign	0,578	0,234

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan hasil pengujian tersebut pada persamaan regresi I diperoleh nilai KS sebesar 0,779 dengan sign 0,578 > 0,05 dan persamaan regresi II memiliki nilai KS sebesar 1,035 dengan sign 0,235 > 0,05 yang berarti persamaan I dan II memiliki data berdistribusi normal, sehingga data dalam penelitian ini bisa digunakan.

2. Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Dari hasil *pengujian* tersebut diperoleh nilai sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Pengujian Heterokedastisitas
Uji Glejser

Keterangan	Persamaan Regresi I	Persamaan Regresi II
Nilai t	0,008	-0,470
Sign	0,994	0,640

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan table di atas dapat diketahui bahwa persamaan regresi I dan II tidak terkena heterokedastisitas yang berarti terdapat kesamaan variance dari residual satu dengan residual lainnya. Hal ini dapat dilihat bahwa pada persamaan regresi I memiliki nilai sign 0,994 dan persamaan II sebesar 0,640 dimana dari sign persamaan regresi I dan II memiliki sign lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data tidak terkena heterokedastisitas.

3. Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *Runs Test*. Fungsi dari uji autokorelasi untuk mengetahui apakah terdapat korelasi pada periode t dengan periode t-1. Dari hasil pengujian autokorelasi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Pengujian Autokorelasi
Runs Test

Keterangan	Persamaan Regresi I	Persamaan Regresi II
Nilai Z	-0,722	-1,686
Sign	0,470	0,092

Sumber: Data Diolah, 2014

Berdasarkan table tersebut diperoleh nilai Z persamaan regresi I sebesar -0,722 ($0,470 > 0,05$) dan persamaan regresi II memiliki nilai Z sebesar -1,686 ($0,092 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terkena autokorelasi.

Pengujian hipotesis dalam penelitian terdapat dua persamaan regresi. Hasil dari persamaan regresi tersebut adalah:

Tabel 5
Hasil Pengujian Regresi Linier

Keterangan	Persamaan I		Persamaan II	
	Nilai	Sign	Nilai	Sign
R ²	0,283		0,043	
A	87,392		182,139	
b1	43,706		44,663	
F	28,242	0,000	4,104	0,047
T	5,314	0,000	2,026	0,047

Sumber: Data Diolah, 2014

Persamaan regresi I:

$$AMH = a + b1DDF$$

Hasil pengujian regresi I tersebut dapat diketahui bahwa konstanta memiliki nilai 87,392 yang berarti rata-rata Angka Melek Huruf di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebesar 87,392. Sedangkan b_1 diperoleh 43,706 yang berarti setiap kenaikan Desentralisasi Fiskal satu rupiah maka dapat meningkatkan Angka Melek Huruf sebesar 43,706. Nilai koefisien determinasi pada persamaan I diperoleh nilai sebesar 0,283 (28,3%) yang berarti variable Desentralisasi Fiskal dapat menjelaskan Angka Melek Huruf sebesar 28,3% dan 71,7% dapat dijelaskan oleh variable lain misalnya seperti tingkat pendidikan guru, dorongan dari keluarga untuk sekolah dan variable lainnya. Angka Melek Huruf di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2011 memiliki rata-rata 91,8% pada tahun 2010 dan pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 0,3%.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan *Fit* karena memiliki nilai F hitung sebesar 28,242 dengan sign $0,000 < 0,05$ sehingga model penelitian ini dapat dilanjutkan. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 5,314 dengan sign 0,000 yang berarti variable Desentralisasi Fiskal dapat mempengaruhi Angka Melek Huruf siswa tingkat SD/MI dan SMP/MTs secara signifikan. Dengan adanya pengaruh tersebut berarti pemerintah daerah bisa lebih mandiri dalam mengurus pemerintahannya sampai ke daerah terjauh, sehingga anak usia 7-15 tahun bisa mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitiannya (Bakti dan Kadoatie 2012) yang menyatakan bahwa Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Angka Melek Huruf perempuan yang berumur 15-24 tahun di Kabupaten Yogyakarta, dimana pengukuran Desentralisasi Fiskal diukur melalui dua sisi yaitu sisi pendapatan dan sisi pengeluaran.

Persamaan Regresi II:

$$APS = a + b_1 DDF$$

Hasil pengujian regresi II tersebut dapat diketahui bahwa konstanta memiliki nilai 182,139 yang berarti rata-rata Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sebesar 182,139. Sedangkan b_1 diperoleh 44,663 yang berarti setiap kenaikan Desentralisasi Fiskal satu rupiah maka dapat meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah sebesar 44,663. Nilai koefisien determinasi pada persamaan I diperoleh nilai sebesar 0,043 (4,3%) yang berarti variable Desentralisasi Fiskal dapat menjelaskan Angka Partisipasi Sekolah sebesar 4,3% dan 95,7% dapat dijelaskan oleh variable lain misalnya seperti banyaknya fasilitas sekolah yang sudah di buat di daerah perkotaan dan perdesaan, banyaknya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya sekolah guru, biaya gaji dan sebagainya. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2010-2011 mengalami kenaikan dimana tahun 2010 sebesar 185,51 dan tahun 2011 sebesar 187,5.

Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan *Fit* karena memiliki nilai F hitung sebesar 4,104 dengan sign $0,047 < 0,05$ sehingga model penelitian ini dapat dilanjutkan. Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,026 dengan sign 0,047 yang berarti variable DDF dapat mempengaruhi APS tingkat SD/MI dan SMP/MTs secara signifikan. Dengan berpengaruhnya desentralisasi fiscal terhadap APS menandakan bahwa anak usia 7-15 tahun sedang mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitiannya (Hadi dan Susana 2013) yang menyatakan bahwa DDF tidak ditemukan secara signifikan terhadap APS tingkat SMA/SMK. (Bakti 2012) juga menemukan hal yang sama dengan (Hadi dan Susana 2013) bahwa DDF tidak dapat mempengaruhi APS perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Yogyakarta.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Desentralisasi Fiskal terhadap Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiscal berlaku di Indonesia mulai tahun 1999 yang ditunjang dengan diterbitkannya UU No 22 tahun 1999 yang kemudian diperbaiki dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 25 tahun 1999 yang diperbaiki dengan UU No 33 tahun 2004 tentang Sumber Pendapatan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai kontribusi desentralisasi fiscal di lingkup pendidikan di daerah Jawa Tengah tahun 2010-2011. Berdasarkan hasil analisis data membuktikan bahwa desentralisasi fiscal dapat meningkatkan angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah. Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2010-2011 mengalami peningkatan PAD dimana desentralisasi fiscal yang diperoleh dapat dialokasikan ke bidang pendidikan untuk pengembangan anak usia 7-15 tahun. PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 mengalami peningkatan 2,7% dibandingkan tahun 2010.
2. Secara statistic desentralisasi fiscal dapat menjelaskan angka melek huruf sebesar 28,3% yang berarti alokasi desentralisasi fiscal dapat memotivasi anak usia 7-15 tahun untuk bisa membaca dan menulis. Sedangkan berdasarkan persamaan II desentralisasi fiscal dapat menjelaskan angka partisipasi sekolah sebesar 4,3% yang berarti alokasi desentralisasi fiscal dapat memotivasi anak usia 7-15 tahun untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Model penelitian persamaan I dan persamaan II memiliki model penelitian yang *Fit* karena memiliki tingkat sign dibawah 5% yaitu persamaan I sebesar 0,000 dan persamaan II sebesar 0,047.

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan serta saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini terbatas hanya tahun 2010-2011 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga terbatas dalam generalisasi hasil penelitian. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambah tahun penelitian atau membandingkan dengan Provinsi lainnya.
2. Terbatasnya variable independen yang digunakan dalam penelitian ini karena sebelumnya ada satu variable independen yaitu Angka Putus Sekolah harus dikeluarkan dari penelitian karena desentralisasi fiskal tidak memiliki model yang *Fit* terhadap Angka Putus Sekolah. Penulis mengharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variable lainnya seperti jumlah bangunan sekolah yang rusak, rasio guru-siswa dan lain sebagainya.
3. Penelitian mengenai desentralisasi fiskal penting untuk mengetahui sejauh mana desentralisasi fiskal yang telah diperoleh Kabupaten/Kota dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat.

PERSANTUNAN

Terimakasih kepada Rektor UMS dan LPPM yang sudah membiayai penelitian ini dan segenap civitas akademika FEB UMS yang sudah membantu menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2011. "Sosial dan Kependudukan". (online). (http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=40¬ab=13 diakses tanggal 5 Oktober 2013 22:16)
- Bakti, Pramilu Galih dan Kodoatie, Maria Johanna. 2012. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan Dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Vol. 1, No. 1. Hal 1-7
- Darise, Nurlan. 2006. "*Pengelolaan Keuangan Daerah*". Penerbit PT INDEKS Kelompok Gramedia. Gorontalo. Hal. 15-16
- Ghozali, Imam. 2006. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Huda, Noval Akhmad dan Hadi Sasana. 2013. "Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap *Outcomes* Pelayanan Publik Bidang Pendidikan (Studi Kasus: Provinsi DKI Jakarta)". Diponegoro Journal of Economic Vol. 2 No 1 Hal. 1-12
- Mardiasmo. 2002. "*Akuntansi Sektor Publik*". Penerbit Andi, Yogyakarta, Hal. 25

Oates, W.E. 1993. "Fiscal Decentralization And Economic Development". National Tax Journal.

Saragih, Juli Panglima. 2003. "Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi". Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta.

Sianturi, Y. Simonsen. 2011. "Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara)". Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

TABEL 1. TABULASI DATA

No	Kabupaten/Kota	AMH		APS		Pendapatan		PAD		DDF	
		2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
1	Kab. Cilacap	92.52	91.46	185.19	190.54	1334844614	1640048746	149933366	173141334	0.112323	0.105571
2	Kab. Banyumas	94.69	94.56	186.48	185.37	1221869030	1593406456	166297528	193263340	0.136101	0.121289
3	Kab. Purbalingga	93.33	94.25	186.23	182.45	984557160	954170516	60278746	94937162	0.061224	0.099497
4	Kab. Banjarnegara	89.55	88.81	174.83	168.71	849712580	1078602850	62486768	71107050	0.073539	0.065925
5	Kab. Kebumen	92.54	92	190.36	188.79	978097201	1273102297	58742306	73339838	0.060058	0.057607
6	Kab. Purworejo	92.68	92.45	188.71	191.41	802215304	980135647	69609314	77111203	0.086771	0.078674
7	kab. Wonosobo	92.1	91.47	164.78	178.68	707921059	979682252	51484507	67397977	0.072726	0.068796
8	Kab. Magelang	93.95	91.39	175.53	188.05	954275140	1115043501	76057773	90462631	0.079702	0.081129
9	Kab. Boyolali	89.86	87.26	189.03	186.15	917898637	1100757125	86485635	96489134	0.094221	0.087657
10	Kab. Klaten	88.89	90.9	195.39	192.76	1060177050	1364127610	54886010	72293790	0.051771	0.052996
11	Kab. Sukoharjo	90.78	91.6	196.5	193.69	797644718	1015438257	64446167	96166807	0.080796	0.094705
12	Kab. Wonogiri	85.18	83.43	185.85	193.34	981560955	1166580279	64968769	77141691	0.066189	0.066126
13	Kab. Karanganyar	90.49	88.15	189.53	195.76	874553917	1043597972	79510217	104080774	0.090915	0.099733
14	Kab. Sragen	84.96	89.93	192.58	192.06	883148530	1094585820	79627348	94519000	0.090163	0.086351
15	Kab. Grobogan	90.88	89.31	178.78	190.27	943965603	1125959814	78364888	84248355	0.083017	0.074824
16	kab. Blera	86.69	83.54	188.06	187.27	809229171	1007776744	47087584	67022631	0.058188	0.066505
17	Kab. Rembang	92.23	92.03	183.26	188.85	681400890	873464931	65699259	73931946	0.096418	0.084642
18	kab. Pati	88.88	86.2	189.51	191.53	1001675113	1229009231	112526537	134475562	0.112338	0.109418
19	Kab. Kudus	93.48	94.37	190.63	188.82	837477147	829832626	94032693	102621949	0.112281	0.123666
20	kab. Jepara	93.25	91.92	178.89	190.37	901969612	1170172671	84713358	103683329	0.09392	0.088605
21	Kab. Demak	93.49	92.32	190.96	190.43	1045501753	1136689817	56959834	79113029	0.054481	0.069599
22	Kab. Semarang	93.19	93.01	198.83	193.97	835583591	1099476750	98831141	133198913	0.118278	0.121148
23	Kab. Temanggung	95.07	94.03	186.48	182.1	675731009	823464884	55206018	63328489	0.081698	0.076905
24	Kab. Kendal	90.58	90.22	189.37	185.15	901333718	1136759150	86235294	93289527	0.095675	0.082066
25	Kab. Batang	91.48	89.55	181	181.59	644772561	657674614	45421962	60155029	0.070446	0.091466
26	Kab. Pekalongan	91.23	92.94	169.29	173.97	749729369	924083696	67580239	82105270	0.09014	0.08885
27	Kab. Pemalang	90.01	91.85	178.64	180.86	969382167	1188521216	71725736	79677543	0.073991	0.067039
28	Kab. Tegal	90.84	89.13	178.66	184.09	946105335	1204377844	73061018	90133274	0.077223	0.074838
29	Kab. Brebes	86.76	88.04	170.67	179.18	1103002988	1315176063	71025305	78275852	0.064393	0.059517
30	Kab. Magelang	97.18	97.13	196.77	191.81	401911337	505438975	59548102	63557702	0.148162	0.125748
31	Kab. Surakarta	96.37	96.27	191.67	195.6	858544967	1029523689	113977008	181096816	0.132756	0.175903
32	Kab. Salatiga	95.5	96.26	196.7	198.63	412249543	478173511	52294851	60611340	0.126852	0.126756
33	Kab. Semarang	96.31	96.51	192.23	195.16	1623567255	2055306534	327992259	522925031	0.20202	0.254427
34	Kab. Pekalongan	96.36	96.17	183.11	183.22	417191612	509929024	47495707	63344978	0.113846	0.124223
35	Kab. Tegal	92.82	94.22	178.52	181.93	460931045	547717522	101321867	117244291	0.21982	0.21406

Sumber data: BPS 2011